



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, Telp. 3843348, 3810361, 3457661 Fax. 3458048
TROMOL POS NO. 1020-JAKARTA 10010.

Nomor : 73/BUA/OT.01.1/04/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) surat
Hal : Penyesuaian Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan TA. 2015

Jakarta, 07 April 2015

Yth. Panitera/Sekretaris Pada 4 Lingkungan Peradilan
Di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-9070/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal perubahan akun belanja barang persediaan dan rencana penerapan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrual yang diberlakukan sejak Januari tahun 2015, maka dihimbau kepada seluruh satuan kerja untuk menyesuaikan perubahan akun tersebut (daftar akun terlampir). Selanjutnya perubahan akun dapat direvisi di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Urusan Administrasi



Dr. Drs. H. Aco Nur, MH.
NIP 19630313 198903 1 021

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawasan MA RI
3. Kepala Biro Keuangan MA RI
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I, LANTAI I, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710
TELEPON 021-3449230 FAKS/MILE 021-3846322

Nomor : S- 9070 /PB/2014
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan

29 Desember 2014

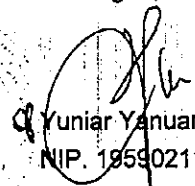
**Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/
Wakil Kepala Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)
di Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan penerapan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrua yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berbasis akrual, telah dilakukan pengembangan sistem akuntansi dan sistem aplikasi pelaporan keuangan untuk K/L maupun BUN.
2. Selanjutnya, dalam pengembangan sistem akuntansi dan aplikasi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah dilakukan beberapa penyesuaian *posting rules* dan Segmen Akun pada Bagan Akun Standar yang mengakibatkan perubahan atas pelaksanaan anggaran.
3. Salah satu perubahan segmen akun yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran adalah perubahan akun belanja yang menghasilkan barang berupa persediaan (sebagaimana terlampir).
4. Perubahan segmen akun tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2015.
5. Untuk mekanisme pelaksanaan pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran agar mempedomani peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
6. Untuk tata cara revisi anggaran agar mempedomani peraturan yang mengatur mengenai tata cara revisi anggaran.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan,


Yuniar Yuliar Rasyid
NIP. 19590211 198101 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
4. Seluruh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
5. Seluruh Kepala KPPN.

Lampiran Surat

Nomor : S-9070 /PB/2014

Tanggal : 29 Desember 2014

DAFTAR PENERIMA SURAT

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal BPK RI
4	Sekretaris Mahkamah Agung RI
5	Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI
6	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
7	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum RI
24	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI
27	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
28	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
29	Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi RI
30	Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup RI
31	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI
32	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
33	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
34	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
35	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
36	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
37	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
38	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
39	Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional
40	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
41	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
42	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
43	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
44	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
45	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
46	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
47	Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI
48	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
49	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
51	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
52	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
53	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
54	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
55	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
56	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
57	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
58	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
59	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
61	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
62	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
63	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
64	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
65	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
66	Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat RI
67	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
68	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
70	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
71	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
72	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Direktur/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
73	Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
76	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
77	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
78	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
79	Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
80	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
81	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
82	Deputi Administrasi Sekretaris Kabinet
83	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
84	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
85	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
86	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Penambahan Akun Belanja Barang Persediaan

1. Akun Belanja Barang Operasional

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
521	BELANJA BARANG	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5218	Belanja Barang Persediaan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
52181	Belanja Barang untuk Persediaan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti: - ATK; - Bahan cetakan; - Alat-alat rumah tangga; - dll	
521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa amunisi.	
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa Pita Cukai, Meterai dan Leges.	
52182	Belanja Barang Persediaan untuk proses produksi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk proses produksi berupa bahan baku.	
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang dalam proses produksi.	
52183	Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.	
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan lainnya.	

2. Akun Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan

Kode Akun	Uraian Akun	Keterangan
523	BELANJA PEMELIHARAAN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
5231	Belanja Pemeliharaan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
52311	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan.	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
52312	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.	
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
52313	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.	
523134	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.	
523135	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan irigasi.	
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan jaringan.	
52319	Belanja Pemeliharaan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan lainnya.	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama